

## TIPOLOGI DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI WILAYAH JAWA BAGIAN BARAT

Oleh:  
Endang Setiasih<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

### ABSTRACT

Economic potency in regions of west java regions is interesting to analyze. On 2000 to 2004, these regions had referred to structural economic changing which signed by the changing of its some secondary economic sectors share..

Nevertheless, regional typology shows the income disparities among the regency on this regions. Especially, the regions with low per capita income and coincide with low economic growth should need to concern. Without right and wise policy, these regions will always left behind from the other regions if they are compared to the regions that have better typology.

**Key words:** *economic potency, regional typology, income disparities*

### PENDAHULUAN

Menurut Arsyad (1999) perbedaan kondisi daerah membawa implikasi terhadap corak pembangunan yang diterapkan. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang ditetapkan di suatu daerah harus disesuaikan dengan kondisi (masalah, kebutuhan dan potensi) daerah yang bersangkutan.

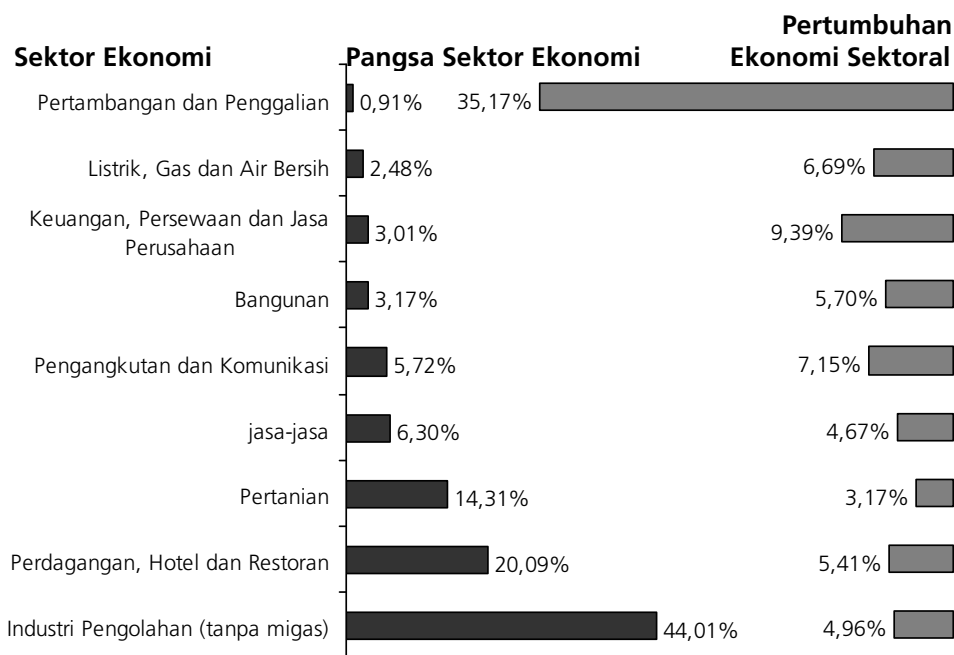
Tulisan ini akan melihat upaya penentuan potensi sektoral daerah-daerah kabupaten dan kota yang terletak di wilayah Jawa bagian barat dan permasalahan tipologi yang melekat sebagai basis pengambilan kebijakan ekonomi.

Pada tulisan ini, wilayah Jawa bagian barat yang dimaksudkan adalah daerah-daerah yang sebelumnya merupakan wilayah Propinsi Jawa Barat sebelum berlakunya pemekaran propinsi. Dengan demikian, daerah-daerah ini meliputi daerah yang tersebar di dua propinsi: Jawa Barat dan Banten. Sampai dengan tahun 2004, pangsa sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan, restoran dan hotel di kedua Propinsi masih mendominasi. Hal ini terlihat dari Grafik 1. Pada tahun 2004, ke tiga sektor ekonomi tersebut memberikan kontribusi bagi PDRB total kedua Propinsi sekitar Rp209 triliun, atau sebesar 77,81%

dari PDRB total Jabar plus Banten. Sisanya, 6 sektor lain kurang dari 1/4 dari total nilai ke tiga sektor tersebut atau menyumbang 22,19% dari PDRB total Jabar + Banten. Ukuran *share* ini belum termasuk nilai PDRB dari sektor minyak dan gas. Jika migas diikuti sertakan dalam komposisi pendukung industri pengolahan, ke tiga sektor ekonomi utama memberikan *share* terhadap PDRB total kedua daerah lebih dari 80%.

Dari grafik 1 terlihat perubahan kontribusi yang jelas antara sektor ekonomi primer (pertanian serta pertambangan dan penggalian) dengan sektor tersier (industri, properti, perdagangan dan jasa lainnya). Bermula dari perubahan kontribusi sektoral wilayah ini, penelitian ini ingin melihat dengan lebih jelas perubahan kontribusi sektor-sektor ekonomi tersebut pada sub wilayah yang lebih kecil, yaitu kabupaten/kota.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perubahan basis ekonomi di kabupaten/kota dalam rentang waktu 2000 – 2004. Selain itu, tinjauan tipologi daerah akan digunakan sebagai upaya untuk melihat perbedaan karakteristik sektor-sektor ekonomi di kabupaten/kota tersebut.



**Gambar 5.1. Pangsa Sektor Ekonomi Sektoral dan Pertumbuhannya di Jawa bagian Barat (Rata-rata 2000 – 2004)**

### METODE ANALISIS

#### 1. Data

Seluruh data yang dipergunakan adalah data sekunder berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut sektor ekonomi per kabupaten/kota dan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik pada harga konstan dengan tahun dasar 2000.

#### 2. Pangsa Sektoral

Salah satu cara untuk melihat suatu sektor ekonomi dikategorikan sektor pemimpin adalah dengan melihat kontribusi nilai produksi sektoral terhadap Produk Domestik Regional Bruto di suatu daerah. Sektor pemimpin ini dipergunakan untuk melihat seberapa besar bagian (*share*) dari nilai produksi setiap sektor ekonomi masing-masing daerah Kabupaten/Kota terhadap PDRB Kabupaten/Kota tersebut. Secara sederhana sektor pemimpin pada tahun *i* untuk daerah-daerah kabupaten/Kota di Jawa bagian barat di dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Leading\ Sector_i = \frac{Nilai\ produksi\ Sektor\ S_i\ di\ Kab / Kota_i}{PDRB_i\ Kabupaten\ atau\ Kota_i}$$

#### 3. Tipologi Daerah

Tipologi Daerah menunjukkan gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Tipologi pada tulisan ini membagi daerah berdasarkan dua indikator utama; pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Axis ditentukan sebagai berikut: sumbu vertikal menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi, sumbu horizontal menunjukkan pendapatan per kapita daerah. Daerah yang diamati dibagi menjadi empat klasifikasi (tabel 5.1) berikut: daerah cepat maju dan tumbuh (pertumbuhan dan pendapatan tinggi), daerah maju tapi tertekan (pendapatan tinggi tapi pertumbuhan rendah), daerah berkembang cepat (pertumbuhan tinggi tapi pendapatan rendah) dan relatif tertinggal (pertumbuhan dan pendapatan rendah) (Kuncoro, 2004).

**Tabel 5.1. Tipologi Daerah Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita**

	PDRB per kapita		
	$(y_i < y)$	$(y_i > y)$	
Pertumbuhan Ekonomi	$(r_i > r)$	Daerah berkembang cepat	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh
	$(r_i < r)$	Daerah relatif tertinggal	Daerah maju tertekan

## HASIL ANALISIS

Setiap sektor ekonomi menunjukkan *share* yang berbeda-beda terhadap PDRB di setiap kabupaten/kota di Jawa bagian barat. Diketahui dari Tabel 5.2, rata-rata sepanjang tahun 2000 – 2004, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan pada umumnya menjadi sektor yang paling memberikan kontribusi utama bagi PDRB. Sel berwarna gelap menunjukkan nilai pangsa terbesar dari setiap sektor ekonomi.

Tingginya pangsa sektor pertanian terjadi terutama di daerah berbentuk kabupaten. Sementara untuk wilayah kota, sektor pertanian memberikan kontribusi yang relatif kecil. Sektor pertanian memberikan kontribusi rata-rata setiap kota sebesar 4,5%. Daerah kota yang masih mengandalkan sektor pertanian dengan pangsa besar adalah Kota Banjar (23,56%) dan terendah adalah Kota Cimahi (0,19%).

Wilayah kota cenderung memperoleh pangsa sektor ekonomi terbesar dari sektor ekonomi modern. Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Tangerang dan Kota Cilegon memperoleh pangsa ekonomi terbesar dari sektor industri pengolahan. Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar memperoleh manfaat ekonomi tertinggi dari sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Sektor pertambangan dan penggalian memberikan sumbangan paling kecil di semua kabupaten/kota baik wilayah Jawa bagian Barat. Setiap daerah rata-rata hanya menerima sumbangan dari sektor ini sebesar 0,7% dari PDRBnya.

Tabel 5.2 memberikan pula gambaran daerah-daerah berbentuk kabupaten yang memperoleh pangsa ekonomi utama dari sektor industri pengolahan merupakan daerah yang relatif lebih dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi utama. Kabupaten Bogor, Purwakarta, Karawang, Bekasi dan Tangerang berdekatan dengan wilayah Jakarta dan cenderung wilayah tersebut merupakan daerah pinggiran atau penyangga pusat pertumbuhan. Dua kabupaten lainnya (Kabupaten Bandung dan Serang) relatif lebih dekat dengan pusat pertumbuhan sekunder.

Untuk melihat perubahan peran atau kontribusi setiap sektor ekonomi selama periode pengamatan, pangsa sektoral tiap daerah perlu dibandingkan antara tahun 2000 dengan tahun 2004. Sel warna gelap pada Tabel 5.3 memperlihatkan perubahan rangking sumbangan setiap sektor ekonomi. Nomor urut 1 menunjukkan pangsa terbesar pada tahun berlaku.

Jika dibandingkan antara tahun 2000 dengan 2004, terdapat beberapa Kabupaten/kota yang menunjukkan perubahan peringkat peranan suatu

sektor ekonomi. Perubahan peringkat sektor-sektor ekonomi tersebut terutama pada sektor-sektor kurang utama atau berada pada peringkat rendah. Sektor-sektor ekonomi utama cenderung tidak berubah peringkatnya.

Di daerah-daerah Jawa bagian barat sebagian besar terjadi pergeseran peran antara sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.. Sektor bangunan yang pada tahun 2000 memberikan pangsa lebih tinggi dari dua sektor ekonomi ini, pada tahun 2004 menunjukkan pangsa ekonomi yang lebih rendah daripada dua sektor ekonomi tersebut. Yang menarik adalah perubahan pangsa ekonomi untuk Kota Sukabumi. Pada tahun 2000, sektor jasa-jasa merupakan sektor ekonomi terbesar kedua setelah sektor perdagangan hotel dan restoran dan tahun 2004 sektor tersebut menjadi sektor dengan pangsa ekonomi terbesar ketiga setelah sektor pengangkutan dan komunikasi menjadi sektor terbesar kedua di Sukabumi.

Sebagian daerah lain tidak menunjukkan adanya perubahan komposisi atau peringkat sumbangannya terhadap besaran PDRB. Daerah-daerah ini terdiri dari 11 daerah kabupaten dan 4 daerah kota. Sektor perdagangan hotel dan restoran merupakan satu-satunya sektor ekonomi yang tidak berubah pangsa ekonominya di seluruh daerah.

Dari sisi kemakmuran ekonomi rata-rata, terlihat perbedaan antara masyarakat Propinsi Jawa Barat dengan Banten maupun antar daerah-daerah di kedua propinsi tersebut.. Hal ini terlihat dari perbedaan pendapatan per kapita maupun pertumbuhan ekonomi (Tabel 5.4). Dari perbandingan bentuk daerah, kabupaten dengan kota, daerah berbentuk kota lebih tinggi rata-rata pendapatan per kapitanya maupun pertumbuhan ekonominya. Tabel ini menunjukkan pula pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di masing-masing Kabupaten/Kota.

Pada analisis tipologi daerah, basis data utama yang dipergunakan adalah pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Pada tipologi ini, daerah-daerah dibagi menjadi empat klasifikasi;

- Kuadran 1 Daerah dengan pendapatan per kapita tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi
- Kuadran 3 Daerah dengan pendapatan per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi
- Kuadran 4 Daerah dengan pendapatan per kapita rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah
- Kuadran 5 Daerah dengan pendapatan per kapita tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah

**Tabel 4.2. Sumbangan Sektor-sektor Ekonomi pada PDRB kabupaten/Kota, rata-rata 2000 - 2004**

Propinsi	Kab/Kota	Sektor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jawa Barat	Bogor	7,19%	1,59%	60,37%	3,80%	3,27%	15,39%	2,74%	1,78%	3,86%
	Sukabumi	37,45%	6,65%	17,54%	1,04%	1,85%	16,23%	5,49%	3,54%	10,22%
	Cianjur	50,37%	0,12%	2,64%	0,75%	3,11%	21,95%	6,70%	4,71%	9,65%
	Bandung	10,00%	0,29%	53,91%	3,56%	2,07%	17,36%	4,95%	2,53%	5,34%
	Garut	51,70%	0,13%	6,96%	0,46%	2,70%	24,99%	2,78%	2,52%	7,74%
	Tasikmalaya	39,22%	0,17%	7,24%	0,95%	4,53%	24,03%	3,71%	3,25%	16,89%
	Ciamis	36,37%	0,38%	7,06%	0,64%	8,39%	23,89%	7,58%	5,34%	10,34%
	Kuningan	46,52%	0,89%	1,82%	0,44%	4,95%	19,96%	7,56%	4,34%	13,52%
	Cirebon	36,56%	0,42%	11,27%	1,93%	6,42%	21,79%	5,82%	4,38%	11,42%
	Majalengka	32,33%	2,07%	17,41%	0,63%	4,58%	20,18%	6,57%	3,69%	12,54%
	Sumedang	29,06%	0,10%	25,56%	2,17%	2,23%	26,12%	3,22%	3,72%	7,83%
	Indramayu	47,22%	0,31%	4,07%	0,79%	2,35%	25,78%	6,67%	2,98%	9,84%
	Subang	38,65%	0,07%	18,63%	1,10%	2,80%	22,16%	4,78%	3,26%	8,55%
	Purwakarta	10,88%	0,19%	44,24%	2,96%	3,09%	25,59%	3,50%	4,64%	4,92%
	Karawang	13,39%	6,55%	44,32%	1,93%	2,37%	21,58%	4,35%	0,98%	4,53%
	Bekasi	2,26%	1,10%	80,91%	1,35%	1,04%	9,13%	1,30%	0,93%	1,98%
	Kota Bogor	0,37%	0,00%	27,73%	3,07%	7,86%	31,61%	9,55%	12,03%	7,78%
	Kota Sukabumi	5,62%	0,01%	4,07%	1,13%	6,23%	43,21%	16,11%	8,49%	15,14%
	Kota Bandung	0,40%	0,00%	31,23%	2,13%	4,92%	32,92%	10,17%	6,82%	11,42%
	Kota Cirebon	0,35%	0,00%	41,15%	1,56%	3,55%	27,51%	16,04%	3,77%	6,06%
Kota Bekasi	1,15%	0,00%	46,87%	2,08%	3,57%	29,03%	7,46%	3,48%	6,36%	
Kota Depok	3,79%	0,00%	39,60%	3,37%	6,51%	29,72%	5,25%	3,83%	7,93%	
Kota Cimahi	0,19%	0,00%	64,08%	3,82%	6,61%	18,46%	1,55%	1,84%	3,45%	
Kota Tasikmalaya	10,64%	0,01%	16,55%	1,43%	9,45%	30,24%	10,13%	7,39%	14,17%	
Kota Banjar	23,56%	0,36%	13,35%	1,00%	4,79%	29,77%	7,04%	6,79%	13,34%	
Banten	Pandeglang	38,77%	0,11%	11,88%	0,69%	4,04%	23,38%	5,30%	4,24%	11,60%
	Lebak	40,20%	1,09%	9,31%	0,32%	3,90%	22,96%	5,26%	4,36%	12,60%
	Tangerang	9,95%	0,08%	56,47%	6,15%	1,84%	12,22%	6,80%	2,35%	4,13%
	Serang	15,53%	0,06%	50,36%	4,09%	6,35%	10,50%	3,03%	2,84%	7,24%
	Kota Tangerang	0,21%	0,00%	56,45%	1,41%	1,85%	25,52%	11,08%	1,41%	2,07%
	Kota Cilegon	3,22%	0,09%	63,37%	9,96%	0,48%	10,98%	8,71%	1,86%	1,31%

Dimana: 1 = pertanian, 2 = pertambangan penggalian, 3 = industri pengolahan, 4 = listrik gas air bersih, 5 = bangunan, 6 = perdagangan hotel restoran, 7 = pengangkutan komunikasi, 8 = keuangan persewaan jasa perusahaan, 9 = jasa-jasa

Grafik 2 menunjukkan tipologi daerah tersebut, sementara Tabel 4 memperlihatkan daerah-daerah di kabupaten/kota Jawa bagian barat yang terklasifikasi menurut jenis tipologi ini.

Dari Grafik 4, tipologi daerah ini menunjukkan adanya disparitas pendapatan per kapita. Dengan rata-rata pendapatan per kapita daerah sebesar Rp5.977.936,89, hanya terdapat 8 daerah dengan kategori berpendapatan tinggi (lebih dari rata-rata). Sisanya, sebanyak 23 daerah lainnya berpendapatan lebih rendah dari pendapatan rata-rata penduduk Jawa Bagian Barat. Pada sisi pertumbuhan ekonomi, terdapat 14 daerah dengan pertumbuhan ekonom di atas

rata-rata dan 17 daerah lainnya berada di bawah nilai rata-rata.

Dari keseluruhan daerah, nilai ekstrem ditunjukkan oleh beberapa daerah. Kabupaten Majalengka merupakan daerah yang paling rendah pendapatan per kapitanya sedangkan Kota Cilegon paling tinggi pendapatan per kapitanya. Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah sementara pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Sukabumi.

Dari hasil tersebut, daerah yang paling tertinggal (relatif terhadap daerah-daerah se Jawa bagian barat lainnya) adalah kabupaten Tasikmalaya. Pendapatan per kapitanya rendah (sedikit lebih tinggi dari kabupaten Majalengka) sementara pertumbuhannya paling rendah. Daerah yang dapat dikatakan daerah paling maju dan pertumbuhannya relatif lebih tinggi dari daerah lain adalah Kota Cilegon. Di Kota ini pertumbuhan ekonominya lebih dari 7%.

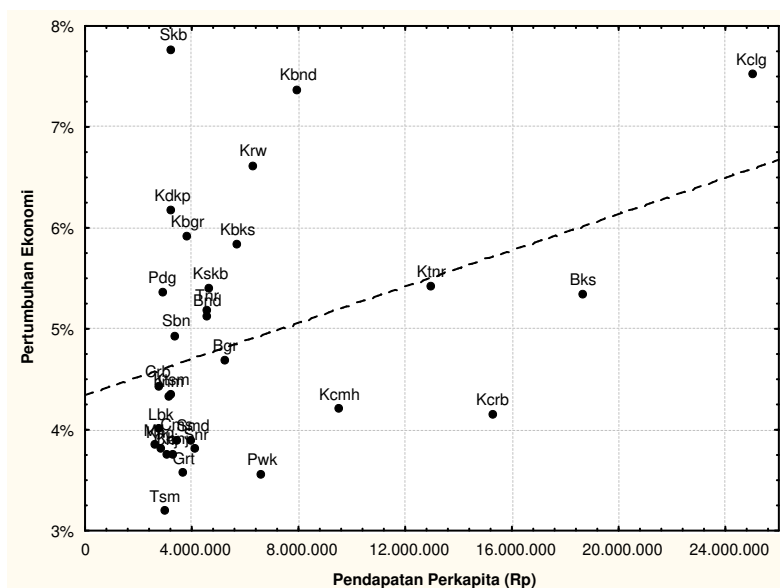
Dengan banyaknya jumlah daerah dengan kategori pendapatan per kapita rendah disertai pertumbuhan ekonomi rendah tersebut, menunjukkan proses pembangunan cenderung tidak merata. Hal terlihat dari tipologi yang terpecah untuk beberapa daerah saja. Dapat dikatakan bahwa terdapat kecenderungan ketimpangan hasil dan proses pembangunan antar daerah di wilayah Jawa bagian barat.

**Tabel 4.3. Perubahan Rank Sumbangan Sektor Ekonomi pada PDRB, 2000 dan 2004**

Propinsi	Kab/Kota	Sektor dan Tahun																	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
		00	04	00	04	00	04	00	04	00	04	00	04	00	04	00	04	00	04
Jawa Barat	Bogor	3	3	9	9	1	1	5	5	6	6	2	2	7	7	8	8	4	4
	Sukabumi	1	1	5	5	2	2	9	9	8	8	3	3	6	6	7	7	4	4
	Cianjur	1	1	9	9	7	7	8	8	6	6	2	2	4	4	5	5	3	3
	Bandung	3	3	9	9	1	1	6	6	8	8	2	2	5	5	7	7	4	4
	Garut	1	1	9	9	4	4	8	8	<b>5</b>	<b>6</b>	2	2	<b>6</b>	<b>5</b>	7	7	3	3
	Tasikmalaya	1	1	9	9	4	4	8	8	5	5	2	2	6	6	7	7	3	3
	Ciamis	1	1	9	9	<b>5</b>	<b>6</b>	8	8	4	4	2	2	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	7	3	3
	Kuningan	1	1	8	8	7	7	9	9	5	5	2	2	4	4	6	6	3	3
	Cirebon	1	1	9	9	<b>3</b>	<b>4</b>	8	8	5	5	2	2	6	6	7	7	<b>4</b>	<b>3</b>
	Majalengka	1	1	8	8	3	3	9	9	6	6	2	2	5	5	7	7	4	4
	Sumedang	1	1	9	9	3	3	8	7	7	8	2	2	6	6	5	5	4	4
	Indramayu	1	1	9	9	5	5	8	8	7	7	2	2	4	4	6	6	3	3
	Subang	1	1	9	9	3	3	8	8	7	7	2	2	5	5	6	6	4	4
	Purwakarta	3	3	9	9	1	1	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	2	2	<b>6</b>	<b>7</b>	5	4	4	5
	Karawang	3	3	<b>9</b>	<b>4</b>	1	1	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	2	2	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Bekasi	3	3	9	5	1	1	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	2	2	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	4	4
	Kota Bogor	8	8	9	9	2	2	7	7	<b>5</b>	<b>6</b>	1	1	4	4	3	3	<b>6</b>	<b>5</b>
	Kota Sukabumi	6	6	9	9	7	7	8	8	5	5	1	1	<b>3</b>	<b>2</b>	4	4	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kota Bandung	8	8	9	9	2	2	7	7	6	6	1	1	4	4	5	5	3	3
	Kota Cirebon	8	8	9	9	1	1	7	7	6	6	2	2	3	3	5	5	4	4
	Kota Bekasi	8	8	9	9	1	1	7	7	6	5	2	2	3	3	5	6	4	4
	Kota Depok	<b>6</b>	<b>7</b>	9	9	1	1	8	8	4	4	2	2	5	5	<b>7</b>	<b>6</b>	3	3
	Kota Cimahi	8	8	9	9	1	1	4	4	3	3	2	2	7	7	6	6	5	5
Kota Tasikmalaya	4	4	9	9	2	2	8	8	<b>6</b>	<b>7</b>	1	1	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	3	3	
Kota Banjar	2	2	9	9	<b>3</b>	<b>4</b>	8	8	7	7	1	1	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	
Banten	Pandeglang	1	1	9	9	3	3	8	8	<b>6</b>	<b>7</b>	2	2	5	5	<b>7</b>	<b>6</b>	4	4
	Lebak	1	1	8	8	4	4	9	9	<b>6</b>	<b>7</b>	2	2	5	5	<b>7</b>	<b>6</b>	3	3
	Tangerang	3	3	9	9	1	1	5	5	8	8	2	2	4	4	7	7	6	6
	Serang	2	2	9	9	1	1	6	6	5	5	3	3	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	4	4
	Kota Tangerang	8	8	9	9	1	1	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	2	2	3	3	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Kota Cilegon	5	5	9	9	1	1	3	3	8	8	2	2	4	4	6	6	7	7

**Tabel 4.4. Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pendapatan Per Kapita, 2000 - 2004**

Propinsi	Kabupaten/Kota	Singkatan kabupaten	Pertumbuhan ekonomi rata-rata tahunan (2000-2004)	Pendapatan perkapita rata-rata tahunan (2000-2004)
Jawa Barat	Bogor	Bgr	4,69%	Rp5.281.101,15
	Sukabumi	Skb	7,77%	Rp3.259.028,03
	Cianjur	Cnj	3,76%	Rp3.039.787,83
	Bandung	Bnd	5,13%	Rp4.545.008,16
	Garut	Grt	3,57%	Rp3.701.704,90
	Tasikmalaya	Tsm	3,19%	Rp2.983.867,71
	Ciamis	Cms	3,90%	Rp3.424.457,79
	Kuningan	Kng	3,82%	Rp2.816.027,03
	Cirebon	Crb	4,43%	Rp2.741.346,15
	Majalengka	Mjl	3,85%	Rp2.620.735,54
	Sumedang	Smd	3,90%	Rp4.005.674,20
	Indramayu	Inm	4,33%	Rp3.164.541,84
	Subang	Sbn	4,94%	Rp3.384.449,06
	Purwakarta	Pwk	3,56%	Rp6.565.426,12
	Karawang	Krw	6,62%	Rp6.277.301,10
	Bekasi	Bks	5,34%	Rp18.626.206,40
	Kota Bogor	Kbgr	5,91%	Rp3.855.403,09
	Kota Sukabumi	Kskb	5,40%	Rp4.635.231,83
	Kota Bandung	Kbnd	7,37%	Rp7.934.238,33
	Kota Cirebon	Kcrb	4,15%	Rp15.258.887,58
	Kota Bekasi	Kbks	5,84%	Rp5.662.397,28
	Kota Depok	Kdpc	6,17%	Rp3.203.578,01
	Kota Cimahi	Kcmh	4,20%	Rp9.492.590,71
Kota Tasikmalaya	Ktsm	4,35%	Rp3.201.663,35	
Kota Banjar	Kbnj	3,76%	Rp3.261.039,06	
Banten	Pandeglang	Pdg	5,36%	Rp2.897.592,29
	Lebak	Lbk	4,01%	Rp2.784.189,11
	Tangerang	Tnr	5,18%	Rp4.576.896,97
	Serang	Srn	3,81%	Rp4.158.544,95
	Kota Tangerang	Ktnr	5,42%	Rp12.957.201,00
	Kota Cilegon	Kclg	7,52%	Rp24.999.926,91



**Gambar 4.2. Tipologi daerah berdasar Pertumbuhan Penduduk dan Pendapatan Per Kapita**

Tabel 5. Tipologi Daerah kabupaten/Kota di Wilayah Jawa bagian barat

		PDRB per kapita	
		<i>Rendah</i>	<i>Tinggi</i>
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Tinggi</b>	<u>Kuadran 2</u> Sukabumi, Bandung, Subang, Pandeglang, Tangerang, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Depok	<u>Kuadran 1</u> Karawang, Bekasi, Kota Bandung, Kota Tangerang, Kota Cilegon
	<b>Rendah</b>	<u>Kuadran 3</u> Bogor, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Lebak, Serang, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar	<u>Kuadran 4</u> Purwakarta, Kota Cirebon, Kota Cimahi

Hasil tipologi daerah ini menunjukkan adanya korelasi yang rendah antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan per kapita. Korelasi yang dihasilkan adalah positif dengan probabilitas kesalahan 3,6%. Regresi yang dihasilkan dari hubungan dua variabel tersebut cenderung konsisten dengan estimasi kemiringan dan nilai parameter sebesar 0,3778 pada probabilitas kesalahan 2,1974%. Kondisi ini menunjukkan hubungan searah antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan per kapita, dimana kenaikan pendapatan per kapita akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi, maupun sebaliknya

### KESIMPULAN

Potensi ekonomi daerah-daerah di wilayah Propinsi Jawa barat dan Banten yang terletak di Jawa bagian barat menarik untuk dikaji. Dengan populasi penduduk yang relatif tinggi di banding daerah-daerah lain di Pulau Jawa maupun luar Jawa, di daerah ini telah terjadi perubahan struktur perekonomian yang ditandai dengan perubahan pangsa ekonomi sektoral, meskipun cenderung bukan pada sektor-sektor ekonomi utama.

Analisis tipologi daerah menunjukkan terdapat beberapa daerah yang kondisi perekonomiannya perlu diwaspadai, terutama daerah dengan klasifikasi pendapatan per kapita rendah disertai pertumbuhan ekonomi rendah pula. Daerah paling perlu mendapat perhatian adalah Kabupaten Tasikmalaya. Daerah ini memiliki ciri daerah paling tertinggal relatif terhadap daerah se Jawa bagian barat lainnya. Pertumbuhan ekonomi di daerah ini paling rendah dibandingkan daerah-daerah lainnya sementara pendapatan per kapitanya juga tergolong lebih rendah. Tanpa kebijakan yang tepat, daerah-daerah relatif tertinggal di masa nanti cenderung untuk tetap tertinggal tingkat kemajuan perekonomiannya dari daerah lain. Demikian pula pada daerah dengan

pendapatan per kapita tinggi tetapi menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih rendah. Kesalahan dalam pengambilan kebijakan akan mendorong daerah-daerah tersebut menjadi daerah yang lambat kemajuan perekonomiannya, dan dampak lanjutannya adalah penurunan aktivitas perekonomian dan diikuti makin rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi..

### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Propinsi Jawa Barat dalam Angka, Biro pusat Statistik, data digital untuk beberapa tahun, Jakarta
- \_\_\_\_\_, Propinsi Banten dalam Angka, Biro pusat Statistik, data digital untuk beberapa tahun, Jakarta
- Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. (edisi pertama). BPFE. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Wagner, 2000, Regional Economic Diversity: Action, Concept, or State of Confusion, *The Journal of Regional Analysis and Policy* (2000)30:2

